

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Dasar-Dasar Hukum Hukum Perumahan*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2011)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya – Jilid 1*, (Bandung: Mandar Jaya, 1994)
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. (Djambatan: Jakarta, 1998)
- Elza Syarif. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012)
- Harjono Soehardi. *Pemantapan Penyusunan Konsep-konsep Tentang Kebijakan Pemanfaatan Tanah Perkotaan di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional*. (Jakarta: Kantor Menteri Negara Agraria/ BPN, 2006)
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku II, Cetakan I* (Jakarta :Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1993)
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005)
- M. Khoidin, *Hukum Jaminan (hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan eksekusi Hak Tanggungan)*. (Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya, 2017)
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2006)
- Manulang, Rinto, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah, & Perizinan Nya*. (Yogyakarta: Buku Pintar 2012)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

- Philipus M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015)
- R. Subekti dan Pradnya Paramita, *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: CV Mandar Maju, 1997)
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Keempat, (Liberty, Yogyakarta, 2008)
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2006)
- Umar Said Sugiharto, *Hukum Pengadaan Tanah*, (Jakarta: Setara Press, 2014)
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: kencana, 2010)
- Wuisman, JJJ M, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996)

## **Jurnal**

- Ana Silviana, “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia”. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 4 Issue 1, March 2021
- Arif Rahman Hakim dan Muammar Alay Idrus, “Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah” *Jurnal*, Vol. 3, Nomor 1, November 2021
- Benny Chandra, “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Dengan Reforma Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Jurnal Mahasiswa Universitas* 17 Agustus 1945
- Dewi Arnita Sari, “Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 5 No. 2 Juli 2020

- Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", *Jurnal Hukum Peraturan* Vol. 3 No. 2 Agustus (2020):97:110
- Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4 Oktober-Desember 2015*
- Endeng, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang" *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 4, No. 1 Juni 2019
- Enny Agustina, "Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik". *Jurnal* Vol. 19 Nomor 3 september 2021
- Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto, "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4* Vol. 24 Oktober 2017
- Iwan Erar Joesoef, "Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Hak Atas Tanah", *Ius Constitutum* Vol.1 No.2 Tahun 2015
- Muhammad Ilham Arisaputra, dkk. "Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Setipikat". *MIMBAR HUKUM* Vol. 29, Nomor 2, Juni 2017
- Mutiara, Dunggio. "Perkembangan Alat Bukti Tulisan Dalam Pembuktian Perkara Perdata", *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 3 Maret 2016
- Ni Luh Juliani, "Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat", *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 1 Tahun 2021
- Rizqi, A. A., & Yusriyadi, "Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Hak atas Tanah dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya". *Notarius*, Vol. 11 Nomor 2, November 2018
- Yunita Krysna Valayvi, "Jaminan Hak Tnaggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan", *Private Law* Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016.

## **Hasil penelitian**

Farida Patittingi. “Penguasaan Tanah Pulau-Pulau Kecil (eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia).” Disertasi, Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2010

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar UUPA

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021

## **Website**

Adriansyah Fadli, “Pemerintah Jamin Keamanan Berlapis Sertipikat Tanah Elektronik”.

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/08/190513721/pemerinta>

[h-jamin-keamanan-berlapis-sertifikat-tanah-elektronik](#), diakses pada 11 Desember 2021

Adriansyah Fadli, “Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik Ditunda”. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/24/183000921/penerapan-sertifikat-tanah-elektronik-ditunda?page=all>, diakses pada 19 Oktober 2021

Ali Imron, SH., MH. dan Muhammad Iqbal, SH., MH. “Hukum Pembuktian”, <https://jdih.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN.pdf>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021

Anisatul Umah, “Canggih! Sertipikat Tanah Digital Ampuh Berantas Mafia Tanah?”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211202182959-4-296253/canggih-sertifikat-tanah-digital-ampuh-berantas-mafia-tanah>, diakses pada 12 Desember 2021

Ari Juliano Gema, “Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah?”, <http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021

Ayu Isti Prabandari, “Perbedaan Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya”, <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-kl.html> diakses pada, 23 Februari 2022

Budi Handoyo, SH.,MH, “Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Progresif”, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1687375&val=18353&title=KONFIGURASI%20POLITIK%20HUKUM%20PERTANAHAN%20INDONESIA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20TEORI%20HUKUM%20RESPONSIF>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

Erlina Fury, “Ini Alasan BPN Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik”, <https://www.gatra.com/news-502845-ekonomi-ini-alasan-bpn-luncurkan-sertifikat-tanah-elektronik.html> diakses pada 22 Februari 2022

Friski Riana, “Kebijakan Sertifikat Tanah Elektronik, KPA: Melanggar Aturan Lebih Tinggi”. <https://nasional tempo.co/amp/1429983/kebijakan-sertifikat-tanah-elektronik-kpa-melanggar-aturan-lebih-tinggi>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022

Sigar Aji Poerana, S.H., “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/>, diakses pada 15 September 2021

I Gusti Agung Dwi Satya Permana dan I Ketut Sandi Sudarsana, “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan BidangTanah”.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10498>, diakses pada 13 October 2021

JPNN.com, “3 Miliar Dokumen Perlu Didigitalkan Untuk Wujudkan Sertipikat Elektronik BPN”.  
<https://www.jpnn.com/news/3-miliar-dokumen-perlu-didigitalkan-untuk-wujudkan-sertifikat-elektronik-bpn>, diakses pada 10 desember 2021

Kejaribone, “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan”.  
<https://www.kejaribone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>, diakses 27 Juli 2021

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Sosial, “Petunjuk Teknis Mafia Tanah”,  
<https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/05/JUKNIS-MAFIA-TANAH.pdf>, diakses pada 07 Agustus 2021

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Sosial, “Ketahui Modus Mafia Tanah”.  
<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=8ser21x/acAc8/MS7R9jboQ1HyT13yydJfi0zoqZvaO3Yx+a+ipGVJ/+P2iRcp30> diakses pada 13 September 2021

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Sosial, “Petunjuk Teknis Mafia Tanah”.  
<https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/05/JUKNIS-MAFIA-TANAH.pdf> diakses pada 07 Agustus 2021

Legal Opinion, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum”,  
<https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada, tanggal 23 Februari 2022

Muhammad Ilham Arisaputra, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah, dan Dian Utami Mas Bakar, “Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertipikat”,  
<https://media.neliti.com/media/publications/196503-ID-akuntabilitas-administrasi-pertanahan-da.pdf>. diakses pada 20 oktober 2021

- Politikum, “Pengertian alat bukti yang sah”  
<http://politikum.blogspot.com/2013/05/pengertian-alat-bukti-yang-sah->,  
diakses pada tanggal 22 Oktober 2021
- Prospeku.com, “Sengketa Tanah: Pengertian, Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya”,  
<https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462>  
diakses pada 20 Februari 2022
- Rachmi Arin Timomor, “Mengenal Pengertian, Fungsi Dan Jenis Sertifikat Tanah”,  
<https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-73855-mengenal-pengertian-fungsi-dan-jenis-sertifikat-tanah-id.html>  
diakses pada 21 Februari 2022
- Skripsi Tesis, “Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif”,  
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/#:~:text=Metode%20Penelitian%20Hukum%20Normatif&text=Dinamakan%20penelitian%20hukum%20doktriner%20dikarenakan,yang%20bersifat%20sekunder%20pada%20perpustakaan.> Diakses pada 23 Februari 2022
- Syarif Hasan, “Kementerian ATR/BN Upayakan Pelayanan Maksimal Untuk Masyarakat Di Tengah Adaptasi Kebiasaan Baru”.  
<https://www.obsessionnews.com/kementerian-atr-bpn-upayakan-pelayanan-maksimal-untuk-masyarakat-di-tengah-adaptasi-kebiasaan-baru/>, diakses pada 12 Desember 2021
- Yoga Sukmana dan Erlangga Djumena, “Kapan Indonesia Bebas Mafia Tanah”.  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/10/224700026/kapan-indonesia-bebas-mafia-tanah-?page=all>, diakses pada 20 desember 2021
- Yulius Satria Wijaya, “Enam Dekade UU Pokok Agraria: reformasi Pertanahan Masih Jalan Di Tempat, Ancaman Menghadang Depan”,  
<https://theconversation.com/enam-dekade-uu-pokok-agraria-reformasi-pertanahan-masih-jalan-di-tempat-ancaman-menghadang-di-depan-146585>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021
- Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik”.  
<https://media.neliti.com/media/publications/115310-ID-keabsahan-akta-notaris-yang-menggunakan.pdf>, diakses pada 07 Agustus 2021